

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Williamson, ketimpangan pembangunan wilayah antarprovinsi di Pulau Sumatera menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan tinggi, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, mencerminkan distribusi pembangunan yang tidak merata, di mana konsentrasi aktivitas ekonomi cenderung terpusat di kota-kota besar sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, provinsi dengan tingkat ketimpangan sedang, antara lain Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, masih menghadapi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan, meskipun kesenjangan tersebut tidak setajam provinsi dengan kategori ketimpangan tinggi. Adapun Sumatera Barat, yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, menggambarkan kondisi pemerataan pembangunan yang relatif lebih baik dengan distribusi ekonomi yang lebih seimbang di berbagai wilayahnya. Secara keseluruhan, ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tetap menjadi isu strategis, khususnya di provinsi-provinsi dengan indeks ketimpangan tinggi, sehingga memerlukan pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, variabel PDRB sektor pertambangan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, dan jalan mantap memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sumatera. Sebaliknya, variabel jalan tidak mantap berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Secara

simultan, variabel-variabel PDRB sektor pertambangan, jalan mantap, jalan tidak mantap, TPAK, dan upah minimum secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sumatera.

## 6.2 Saran

Setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut ini beberapa usulan saran:

1. Diperlukan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) yang merata di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat menciptakan pemerataan pembangunan secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Sumatera dapat diminimalisir secara signifikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan variabel-variabel bebas tambahan yang relevan dengan indikator ketimpangan wilayah yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memperdalam kajian dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan wilayah.
3. Pelaksanaan program-program produktif menjadi sangat krusial dalam upaya menurunkan ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Sumatera. Hal ini dapat direalisasikan melalui kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, guna mencegah timbulnya ketimpangan yang tinggi. Selain itu, pemerintah yang bersih dan partisipatif memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan wilayah melalui penguatan tata kelola dan peningkatan partisipasi masyarakat. Perluasan dan penciptaan lapangan kerja yang merata juga menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara merata. Pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, sangat diperlukan untuk

mempermudah akses dan mobilitas barang, jasa, dan manusia dalam jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia secara intensif, termasuk menjaga kelayakan upah minimum, merupakan faktor penting agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, sehingga kesejahteraan dapat terwujud secara merata dan ketimpangan dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan sektor-sektor unggulan yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi juga perlu menjadi fokus utama kebijakan pembangunan.

4. Masyarakat umum diharapkan dapat bersinergi secara aktif dengan pemerintah dalam proses pembangunan daerah masing-masing. Mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya, aspirasi serta partisipasi mereka sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, dengan keyakinan bahwa pemerintah akan mengarahkan upaya dan kebijakan yang diterapkan demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama.